



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG  
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dan tempat mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat serta mengembangkan potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar akan fungsi perpustakaan menjadi perpustakaan transformatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
9. Undang-Undang Nomor 2005 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Noor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.



2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di lingkup Kabupaten Mesuji.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Mesuji.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan /atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional di wilayah Desa.
10. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
12. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
13. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
14. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user oriented*, bukan lagi *building-oriented*.
15. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
16. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
17. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

18. Taman Bacaan Masyarakat, selanjutnya disingkat TBM adalah tempat yang sengaja di buat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan Masyarakat.
19. *Stakeholder* adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
20. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai sarana pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah termasuk di lingkup Desa serta sebagai sarana pembudayaan gemar membaca.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk meningkatkan literasi informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. untuk mewujudkan Program Pemerintah Daerah agar satu desa yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi social.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perpustakaan;
- b. pembentukan Perpustakaan penyelenggaraan Perpustakaan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- c. tenaga Perpustakaan dan pendidikan;
- d. transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- e. peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- f. hak, kewajiban, dan kewenangan;
- g. pembinaan teknis Perpustakaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. sarana dan prasarana; dan
- j. pendanaan.



## BAB IV PERPUSTAKAAN

### Pasal 5

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan harus mempunyai koleksi hasil budaya daerah masing-masing.

## BAB V PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN SERTA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

### Pasal 6

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan /atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki koleksi perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
  - d. memiliki sumber perdanaan; dan
  - e. memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan tingkat Provinsi Lampung.

### Pasal 7

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

### Pasal 8

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

## BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

### Pasal 9

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan.

- (2) Dalam hal tertentu pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pendidikan

### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerja sama antara Perpustakaan Umum Kabupaten dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

## BAB VII

## TRANSFORMASI PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

### Pasal 11

Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan cara:

- a. pemerataan layanan perpustakaan di tingkat Daerah dan desa;
- b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

### Pasal 12

Pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:

- a. *Customer Perspective*, yaitu meningkatkan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. *Stakeholder & Internal Process Perspective*, yaitu meningkatkan sinergitas antarperan perpustakaan di pusat, daerah, Kementerian/Lembaga dalam pembangunan masyarakat; dan
- c. *Learning & Growth*, yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan.



BAB VIII  
PERAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 13

Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah sebagai berikut :

- a. perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat;
- d. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 14

Hak, Kewajiban dan Kewenangan dalam hal Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melibatkan hak, kewajiban dan kewenangan masyarakat dan Pemerintah.

Pasal 15

Dalam rangka Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat berhak untuk:

- a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 16

Dalam rangka Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga Pelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 17

Dalam rangka mewujudkan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;

- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di daerah; dan
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di wilayah masing-masing sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di wilayah masing-masing.

### BAB X

#### PEMBINAAN TEKNIS PERPUSTAKAAN

##### Pasal 19

- (1) Pembinaan teknis Perpustakaan meliputi:
  - a. pengelolaan Perpustakaan sesuai standar;
  - b. pengembangan sumber daya manusia;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
  - d. kerja sama dan jaringan Perpustakaan; dan
  - e. pengembangan minat baca.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

### BAB XI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 15 dan Pasal 16.

### BAB XII

#### SARANA DAN PRASARANA

##### Pasal 21

Setiap penyelenggaraan Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

### BAB XIII

#### PENDANAAN

##### Pasal 22

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XIV  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 23

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat dilakukan dengan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Peningkatan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
  - a. peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
  - b. peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan;
  - c. peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca;
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini terkait teknis pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI MESUJI,






  
SAPLYTH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

  
SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	